

Pengaruh Besaran Anggaran Belanja Pemerintah dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

The Influence of the Amount of Government Expenses Budget to the Society Welfare Improvement

Ana Uluwiyah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS), Jl.Raya Jagakarsa No.70 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, (021) 7873782-83, auluwiyah@bps.go.id, 0856-2657434.
diterima, diperbaiki, disetujui

Abstract

Government expenses budgets from year to year always increase. Some budget allocations are realized in Subsidized Expenditures, Social Aid Expenditures, and Aid Expenditures. The amount of the budget is different every year, according to the government program being launched. However, based on several welfare indicators, an increase in government spending has not contributed significantly yet to the level of welfare from year to year. This research was aimed to analyze whether the amount of government spending was influenced by several society welfare indicators. It used only several welfare indicators, namely indicators of health, education, poverty, life environment and inflation. It was conducted by using a quantitative analysis approach, with simple linear regression analysis. Based on the results of the study, it was found out that only a few welfare indicator variables that had a significant relation to government assistance spending, namely the percentage of PLN/Electricity power users, the percentage of families having proper sanitation, the percentage of poverty, the percentage of % of under-5-years old babies who had received Polio immunization, and the percentage of % of under-5-years old babies who had received measles immunization. The variables of Inflation and Education indicators do not affect significantly to the amount of government assistance spending. It showed that the amount of government assistance expenses budget had not obviously impacted to human resources improvement program and to that of prices stability of basic needs. Therefore, the Government necessarily need to add the allocation of the amount of government assistance expenses budget to improve the educational capacity of the society and prices stability of basic needs through providing subsidize or direct aids.

Keywords: *assistance spending; welfare indicators; regression*

Abstrak

Anggaran belanja pemerintah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Beberapa alokasi anggaran direalisasikan pada Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan. Besaran anggaran belanja tersebut setiap tahun berbeda, disesuaikan dengan program pemerintah yang sedang dicanangkan. Berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan, peningkatan anggaran belanja pemerintah belum memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan dari tahun ke tahun. Penelitian bertujuan untuk menganalisis besaran belanja pemerintah dipengaruhi oleh beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Penelitian hanya menggunakan beberapa indikator kesejahteraan yaitu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, lingkungan hidup dan inflasi. Metode penelitian dengan pendekatan analisis kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hanya beberapa variabel indikator kesejahteraan yang memiliki hubungan yang kuat dengan belanja bantuan pemerintah yaitu persentase rumah tangga pengguna listrik PLN, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, persentase penduduk miskin, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi polio, dan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak. Variabel indikator pendidikan dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa besaran anggaran belanja bantuan pemerintah belum memberikan dampak yang terlihat nyata pada program peningkatan sumber daya manusia dan kestabilan harga bahan pokok di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menambah alokasi belanja bantuan untuk peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat dan kestabilan harga bahan pokok melalui subsidi atau bantuan langsung.

Kata Kunci: *belanja bantuan; indikator kesejahteraan; regresi*

A. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan pemerintah (Deswanto, 2010). Beberapa program sosial telah dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan Indonesia seperti transmigrasi, beras murah, subsidi bahan bakar, dsb. Anggaran belanja bantuan pemerintah setiap tahun dialokasikan berdasarkan PMK No. 81/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L dan PMK No. 214/2013 tentang Bagan Akun Standar. Bantuan Sosial diartikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (PAPBN, 2018).

Besaran anggaran belanja tersebut setiap tahun berbeda, disesuaikan dengan program pemerintah yang sedang dicanangkan. Akan tetapi berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan, peningkatan besaran anggaran belanja pemerintah belum memberikan kontribusi secara signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun (Suradi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, 2012).

Kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012). Namun menurut (Paseki, Naukoko, & Wauran, 2014), Alokasi Dana Umum dan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan penilaian yang lebih luas antara besaran belanja bantuan pemerintah dengan dampak yang dihasilkan, salah satunya adalah mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Fajar, 2018) indikator untuk mengukur indeks kesejahteraan dengan mengkomodir tingkat kebahagiaan masyarakat, sedangkan menurut (BPS, 2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu

wilayah. Komponen penyusun IPM terdiri atas Angka Harapan Hidup, Angka Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita. Indikator-indikator kualitas hidup yang mencakup komponen sumber daya alam, modal manusia, dan sosial merupakan indikator yang perlu digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan yang lebih luas daripada produksi ekonomi untuk memprediksi masa depan pada pembangunan berkelanjutan (Rustia, 2012).

Dalam penelitian ini indikator kesejahteraan dibatasi pada indikator pendidikan, kualitas lingkungan, inflasi, kesehatan, dan pendidikan. Indikator ini untuk mengukur capaian tujuan program peningkatan kesejahteraan pemerintah terhadap belanja bantuan pemerintah. Informasi terkait alokasi belanja bantuan terhadap dampak kesejahteraan masih sedikit diinformasikan kepada masyarakat. Padahal hal ini penting, mengingat masyarakat merupakan sumber dana anggaran belanja pemerintah yaitu melalui pembayaran pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh indikator kesejahteraan terhadap besaran belanja bantuan pemerintah. Penelitian ini memiliki batasan pada sumber data dan metode analisis, sehingga hanya beberapa komponen penyusun tingkat kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian, dan data belanja bantuan pemerintah secara nasional. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang belanja bantuan pemerintah yang dialokasikan setiap tahun apakah dipengaruhi oleh target kinerja kesejahteraan yang dicapai pada tahun tertentu tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif dan inferensia dengan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum terkait indikator penyusun kesejahteraan dan belanja bantuan pemerintah melalui visualisasi. Anali-

sis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan pengaruh tiap variabel tidak terikat/ variabel prediktor (r) yaitu indikator kesejahteraan terhadap variabel terikatnya/ variabel respon (Y) yaitu belanja bantuan pemerintah. Adapun model regresi berganda sebagai berikut.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip} = \varepsilon_i \dots \dots \dots (1)$$

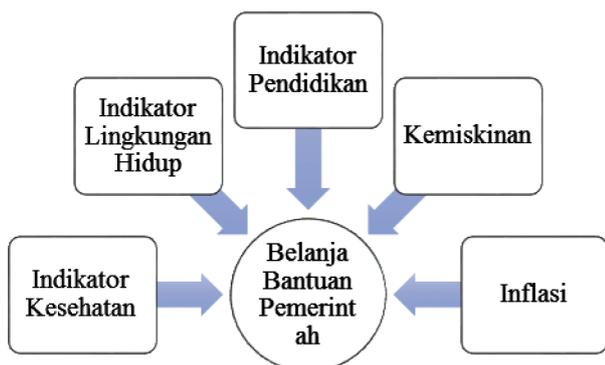
Y_i = nilai variabel terikat/dependen dalam pengamatan i

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_p$ = parameter yang tidak diketahui nilainya

X_{i1}, X_{i2}, X_{ip} = nilai variabel tidak terikat/ independen dalam pengamatan ke- i

ε_i = error random

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* tahun 2006 sampai 2017 yang diperoleh melalui website BPS. Jenis data yang digunakan adalah data kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, tingkat inflasi, dan keuangan pada level Nasional. Pengujian menggunakan *tools* Microsoft Excel 2016 dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas dihipotesiskan bahwa besarnya belanja bantuan dipengaruhi oleh capaian indikator kesejahteraan yang dirinci berdasarkan indikator kesehatan, indikator lingkungan hidup, indikator pendidikan, kemiskinan, dan inflasi.

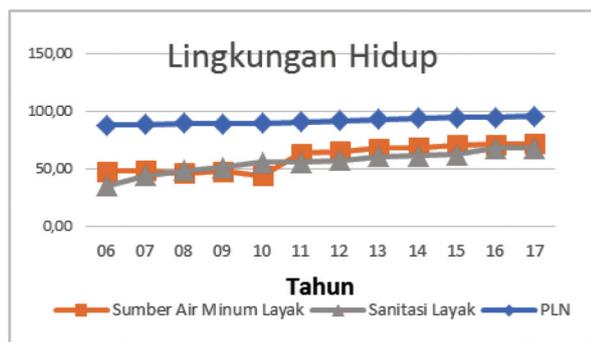
C. Hasil dan Pembahasan

Beberapa program pemerintah dengan sasaran masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan selalu dilakukan oleh beberapa generasi pemimpin negara Indonesia. Program tersebut diantaranya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Masyarakat Miskin, subsidi BBM, beasiswa, jaminan kesehatan, dan program lain. Metode penyampaian program tersebut biasanya bersifat langsung kepada masyarakat.

Untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dihasilkan dari program tersebut, perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja program. Beberapa data indikator kesejahteraan telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator capaian kinerja program peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa komponen penyusun indikator kesejahteraan. Komponen penyusun indikator kesejahteraan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut.

1. Indikator lingkungan hidup: Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dari Listrik PLN, sumber air minum layak, sanitasi layak;
2. Indikator kesehatan memuat persentase balita yang pernah mendapat imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak;
3. Indikator pendidikan memuat Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, PT/Universitas;
4. Tingkat kemiskinan;
5. Inflasi

Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* BPS, bahwa indikator lingkungan hidup yang mencakup ketersediaan listrik PLN lebih tinggi dari ketersediaan fasilitas sumber air minum layak dan sanitasi layak. Akan tetapi, pergerakan kenaikan sumber air minum layak dan sanitasi layak meningkat tajam sejak tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah peduli dan fokus terhadap lingkungan hidup yang sehat.



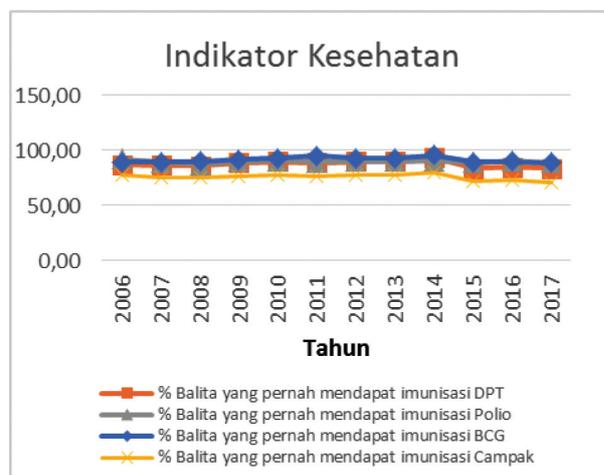
Gambar 2. Lingkungan Hidup Tahun 2006-2017
Sumber: www.bps.go.id

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki, dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2010). Angka kemiskinan merupakan indikator yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Suradi (2017), pembangunan manusia dan kemiskinan merupakan kondisi yang menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2006 sampai 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara teratur (gambar 3). Angka kemiskinan tahun 2017 sebesar 10,12 persen menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia di tahun 2017 ada sebanyak 10,12 persen dari total penduduk Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin



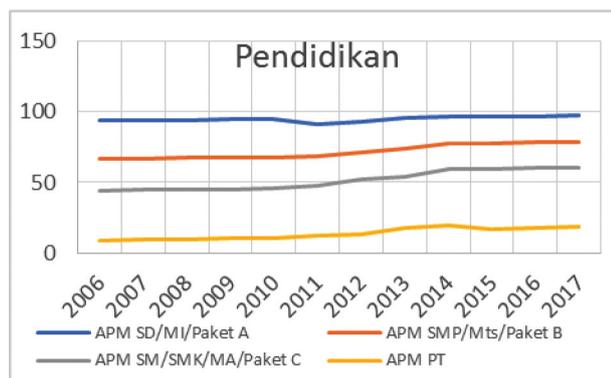
Gambar 3. Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2006-2017
Sumber : www.bps.go.id

Indikator kesehatan dalam penelitian ini diukur dari persentase anak balita yang pernah mendapat imunisasi. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberian imunisasi gratis melalui puskesmas. Berdasarkan gambar 4, persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi DPT, Polio dan BCG relatif stabil, namun mulai tahun 2015 hingga 2017 menurun. Penurunan ini disebabkan oleh sejak tahun 2015 hingga 2020 pemerintah memiliki program untuk menggalakkan imunisasi Measles-Rubella (MR) (P. Paramita, 2018)



Gambar 4. Indikator Kesehatan tahun 2006-2017

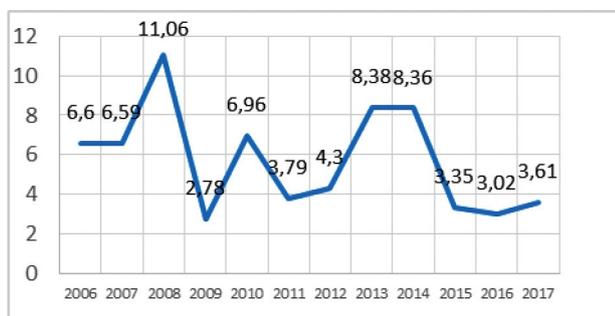
Indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Jika APM sama dengan 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu (Statistik, 2018). APM untuk tingkat SD lebih tinggi apabila dibandingkan dengan APM Perguruan Tinggi atau SMA dan SMP. Akan tetapi kenaikan APM SMA dan perguruan tinggi lebih tajam sejak tahun 2014. Hal ini disebabkan pemerintah menambah kuota program beasiswa yang ditawarkan seperti program Bidikmisi. Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan (Kemenristekdikti) jumlah penerima Bidikmisi tahun 2014 199.408 mahasiswa, menjadi 339.348 tahun 2017.



Gambar 5. APM Tahun 2006-2017
Sumber : www.bps.go.id

Inflasi dalam penelitian ini merupakan salah satu komponen ukuran kesejahteraan. Karena inflasi mempengaruhi perubahan harga barang pokok ditingkat masyarakat, sehingga inflasi sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Suseno & Astiyah, 2009). Berdasarkan gambar 6, tingkat inflasi sangat fluktuatif.

Perubahan tingkat inflasi yang fluktuatif ini disebabkan oleh beberapa faktor. Utamanya adalah kenaikan harga sembilan bahan pokok seperti beras, cabai, telur, dll. Ketersediaan bahan pokok tersebut umumnya berasal dari import yang dibeli dengan mata uang asing, sedangkan kurs mata uang rupiah setiap waktu berubah fluktuatif (Yanti, 2016). Hal inilah yang mengakibatkan fluktuatifnya inflasi di Indonesia.



Gambar 6. Inflasi tahun 2006-2017.
Sumber : www.bps.go.id

Anggaran belanja pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) unsur yaitu belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan

daerah. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan, dan pengeluaran tidak terduga. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja modal.

Berdasarkan data yang dikutip dari *website* BPS (www.bps.go.id), belanja bantuan memiliki kenaikan yang sangat tajam di tahun 2016 dan tahun 2017. Beberapa realisasi belanja lain memiliki nilai yang hampir sama dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 7. Akan tetapi belanja bantuan sejak tahun 2015 meningkat tajam.

Sejak tahun 2015, pemerintah mulai banyak membuat kebijakan terkait program sosial untuk pengentasan kemiskinan. Dorongan utamanya adalah adanya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diberlakukan secara internasional sejak tahun 2015. Beberapa program tersebut diantaranya seperti Beras Miskin (Raskin) dan Program *bantuan* tunai utama (PKH) (Bappenas, Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia - Unicef, 2017)



Gambar 7. Pergerakan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Tahun 2006 s.d 2017
Sumber: www.bps.go.id

Pembiayaan program kesejahteraan masyarakat bersumber pada beberapa anggaran belanja pemerintah. Menurut (Kusreni & Suhab, 2009), program peningkatan kesejahteraan rakyat dilaksanakan berdasarkan anggaran belanja subsidi, belanja bantuan, dan belanja ban-

tuan sosial, yang bersumber dari pajak. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 101 Tahun 2011, belanja bantuan, belanja subsidi, dan belanja bantuan merupakan belanja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum (Keuangan, 2011). Hal ini menjadi dasar bagi penelitian ini, analisis hanya menggunakan ketiga realisasi belanja tersebut.

Berdasarkan data belanja pemerintah, belanja bantuan sejak tahun 2015 bergerak meningkat. Puncaknya tahun 2016 hingga saat ini mengalami peningkatan yang tajam. Belanja bantuan merupakan belanja yang langsung disalurkan kepada penerima program khususnya program peningkatan kesejahteraan /kegiatan sosial kepada masyarakat. Hal ini seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui indikator kesejahteraan. Dampak realisasi belanja bantuan sulit untuk diukur, apakah belanja mampu meningkatkan indikator pendidikan, kesehatan, atau stabilisasi perekonomian. Untuk itu, penelitian ini menganalisis sasaran belanja pemerintah pada periode waktu

tertentu dengan tujuan peningkatan kesejahteraan pada unsur komponen tertentu.

Analisis kuantitatif yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan tujuan untuk melihat hubungan/pengaruh antara variabel belanja pemerintah dengan komponen indikator kesejahteraan. Analisis regresi berganda dipilih karena metode analisis ini merupakan metode yang paling mudah dan paling sesuai menggambarkan pengaruh suatu variabel terikat dan tidak terikat. Berdasarkan pengujian dengan regresi diperoleh hasil bahwa Belanja Bantuan sangat berhubungan dengan indikator kesehatan persentase balita yang mendapatkan imunisasi polio dan campak, dan berhubungan dengan persentase Penduduk Miskin. Belanja bantuan sosial berhubungan dengan persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak dan persentase penduduk miskin. Belanja subsidi sangat berhubungan dengan persentase penduduk dengan akses sanitasi layak, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi polio dan persentase penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1,2 dan 3.

Tabel 1. Hasil Pengujian Belanja Bantuan dengan Indikator Kesejahteraan

No.	Variabel	Coefficient	P-Value
1.	PLN	18172314076	0,07
2.	Sumber Air Minum Layak	-1814864377	0,24
3.	Sanitasi Layak	-892203206,5	0,60
4.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG	-3556787421	0,46
5.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT	13770915531	0,06
6.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio	8427799367	0,04
7.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	-21428488560	0,00
8.	APM SD/MI/Paket A	961867734	0,95
9.	APM SMP/Mts/Paket B	9709204406	0,81
10.	APM SM/SMK/MA/Paket C	1556915227	0,95
11.	APM PT	-9358787376	0,12
12.	Persentas Penduduk Miskin	-7692958337	0,02
13.	Inflasi	-5518619600	0,11

Tabel 2. Hasil Pengujian Belanja Sosial dengan Indikator Kesejahteraan

No.	Variabel	Coefficient	P-Value
1.	PLN	-1017817742	0,06
2.	Sumber Air Minum Layak	-81729459,07	0,33
3.	Sanitasi Layak	162770605,6	0,10
	Indikator Kesehatan	181201046,3	0,82
4.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG	-1306261237	0,24
5.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT	-1207255031	0,08
6.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio	1732459185	0,03
7.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	6908310,27	0,99
8.	APM SD/MI/Paket A	570566884	0,83
9.	APM SMP/Mts/Paket B	-854100046	0,63
10.	APM SM/SMK/MA/Paket C	176956984	0,63
11.	APM PT	791321967	0,003
12.	Persentase Penduduk Miskin	366375195	0,22
13.	Inflasi		

Tabel 3. Hasil Pengujian Belanja Subsidi dengan Indikator Kesejahteraan

No.	Variabel	Coefficient	P-Value
1.	PLN	-86301358	0,14
2.	Sumber Air Minum Layak	-953637,94	0,91
3.	Sanitasi Layak	34884568,2	0,00
4.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG	19571397,5	0,65
5.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT	59350738	0,32
6.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio	-86854483,7	0,03
7.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	-56232118,3	0,16
8.	APM SD/MI/Paket A	122450110	0,43
9.	APM SMP/Mts/Paket B	-359175662	0,38
10.	APM SM/SMK/MA/Paket C	208970955	0,42
11.	APM PT	54915803,4	0,32
12.	Persentas Penduduk Miskin	-38338066	0,06
13.	Inflasi	-994424	0,96

Berdasarkan hasil uji regresi antara belanja pemerintah dengan beberapa indikator kesejahteraan diatas, didapatkan nilai P-Value yang berbeda untuk setiap variabel. P-Value adalah salah satu ukuran peluang pengambilan keputusan. P-Value kurang dari 0,005 diartikan signifikan memberikan pengaruh kepada variabel terikatnya. Untuk melihat pengaruhnya negatif atau positif dapat dilihat pada nilai *coefficient*. Ukuran untuk mengukur sebesar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya, dapat dilihat nilai R-Square.

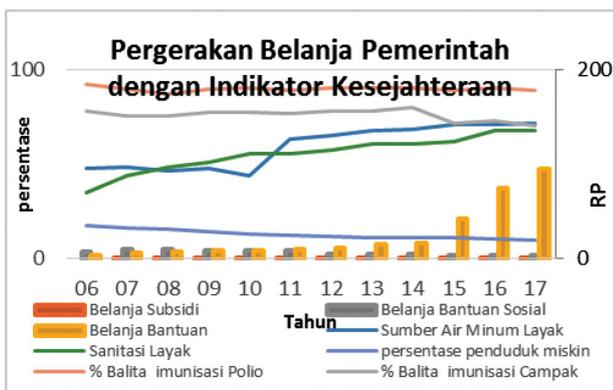
Berdasarkan tabel 2 dan 3 dapat dianalisis bahwa tidak semua indikator memiliki hubungan yang signifikan dengan alokasi belanja pe-

merintah. Hanya beberapa indikator saja yang memiliki hubungan yaitu pengguna listrik PLN, sanitasi layak, persentase penduduk miskin, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Polio, dan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Campak.

Hal ini menunjukkan bahwa besaran belanja pemerintah memberikan dampak pada peningkatan kesehatan, lingkungan, dan kemiskinan, tidak berpengaruh dengan indikator pendidikan. Indikator pendidikan tidak terpengaruh oleh belanja bantuan pemerintah, padahal pemerintah telah memiliki program beasiswa nasional sejak tahun 2014 seperti LPDP dan Bidikmisi. Hal ini, dapat menjadi perhatian pemerintah, untuk meningkatkan SDM Indonesia, pemerin-

tah harus lebih banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk program pendidikan.

Berikut ini adalah gambaran antara indikator yang terpengaruh dengan tingkat belanja bantuan pemerintah. Ternyata peningkatan belanja bantuan pemerintah meningkat signifikan di tahun 2015, tetapi indikator terpengaruh tidak bergerak meningkat atau menurun signifikan juga. Hal ini menjadi kelemahan penelitian ini, perlu dilakukan pengujian kembali dengan data indikator dan metode yang lain.



Gambar 8. Pergerakan Belanja Pemerintah dan Indikator kesejahteraan yang berhubungan tahun 2006-2017

Model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon$$

$$Y_1 = \alpha \beta X_{11} + \beta X_{22} - \beta X_{31} + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

- Y_1 = Belanja Bantuan
- X_{11} = % Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio
- X_{21} = % Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak
- X_{31} = % Penduduk Miskin

Nilai R-Square persamaan 2 adalah 0,9005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1,X2, dan X3 mampu mempengaruhi sebesar 90 %, 10 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

$$Y_2 = \alpha \beta X_{12} - \beta X_{22} + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

- Y_1 = Belanja Bantuan Sosial
- X_{12} = % Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak
- X_{22} = % Penduduk Miskin

Nilai R-Square persamaan 3 adalah 0,6005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 mampu mempengaruhi sebesar 60 %, 40 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

$$Y_1 = \alpha \beta X_{11} + \beta X_{21} - \beta X_{31} + \varepsilon \dots\dots\dots(4)$$

- Y_1 = Belanja Subsidi
- X_{11} = % Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio
- X_{21} = % penduduk memiliki akses sanitasi layak
- X_{31} = % Penduduk Miskin

Nilai R-Square persamaan 4 adalah 0,7476. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 mampu mempengaruhi sebesar 75 %, 25 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan permodelan diatas, dapat uraikan bahwa persentase balita yang mendapatkan imunisasi polio, campak berpengaruh positif pada besaran bantuan, sedangkan persentase penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap peningkatan belanja bantuan. Persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak berpengaruh positif pada belanja bantuan sosial. Belanja subsidi dapat dipengaruhi oleh besaran persentase balita yang mendapatkan imunisasi polio, sanitasi layak dan penduduk miskin. Program imunisasi polio gratis yang dibiayai oleh belanja subsidi. Kedepannya pemerintah harus lebih banyak menciptakan kegiatan subsidi imunisasi dan pembuatan fasilitas sanitasi.

D. Penutup

Kesimpulan: Kesimpulan yang dapat diambil adalah persentase penduduk memiliki akses sanitasi layak, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak dan polio, dan persentase penduduk miskin mempengaruhi

besarnya belanja bantuan pemerintah. Angka Partisipasi Murni tidak mempengaruhi besarnya belanja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja bantuan pemerintah masih dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada unsur kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat dan tingkat kemiskinan. Kesejahteraan pada unsur pendidikan belum menjadi perhatian yang kuat bagi pemerintah.

Rekomendasi: Pemerintah harus memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat, dengan menambah alokasi belanja bantuan untuk peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim pengajar Karya Tulis Ilmiah, Pusdiklat BPS, dan beberapa rekan pegawai BPS.

Pustaka Acuan

- Bappenas. (2010). *Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin*. Bappenas.
- Bappenas. (2017). *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia - Unicef*. Bappenas.
- BPS. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016*. Jambi: BPS Tanjung Jabung Timur. Diambil kembali dari BPS.
- Deswanto, D. B. (2010). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi kalimantan Barat Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 187-210.
- Fajar, M. (2018, Desember). *Indikator Sederhana Untuk Mengukur Kesejahteraan*. Diambil kembali dari Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/325071006_Indikator_Sederhana_Untuk_Mengukur_Kesejahteraan
- Keuangan, K. (2011). *Klasifikasi Jenis Belanja*. Jakarta: www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Kusreni, S., & Suhab, S. (2009). Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*.
- P.Paramita, R. (2018, 12). *Cakupan imunisasi campak cenderung turun*. Diambil kembali dari Beritagar: <https://beritagar.id/artikel/berita/cakupan-imunisasi-campak-cenderung-turun>
- PAPBN, D. (2018, 11). *Departemen Keuangan*. Diambil kembali dari Anggaran Departemen Keuangan: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=977>
- Paseki, M., Naukoko, A., & Wauran, P. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 14*, 30.
- Rustia, H. N. (2012). Mengukur Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 225-232.
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan perKapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi dan Manajemen Vol.2 ISSN: 0854-1442*.
- Statistik, B. P. (2018, 11). *Sirusa*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=9>
- Suradi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol.12 No.03*, 1-11.
- Suradi. (2012). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *Informasi Vol.17 No.03*.
- Suseno, & Astiyah, S. (2009). *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Yanti, M. N. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 21*, 186.

